

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Presiden (pilpres) Republik Indonesia yang lazim disebut sebagai Pemilihan Umum (pemilu) merupakan salah satu agenda penting dalam sistem politik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan setelah pemilihan lembaga legislatif. Dalam perkembangannya, pilpres diposisikan sebagai bagian terpenting dalam konstelasi politik (Himawan, 2014: 38).

Lebih lanjut, Deddy Mulyana (2014: 103) menjelaskan bahwa di negara-negara dengan sistem demokrasi yang telah mapan seperti Amerika Serikat, Australia dan Inggris, pemilu sangat menarik perhatian masyarakat. Hal ini dikarenakan pemilu menandai adanya perubahan pemerintahan, kepemimpinan nasional dan tidak menutup kemungkinan nasib mereka di masa mendatang juga akan mengalami perubahan.

Farahdiba (2014: 7) dalam penelitiannya memaparkan bahwa Pemilu pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955, yaitu pada masa jabatan Presiden Soekarno 1955 yang diikuti oleh 4 partai besar yaitu PNI, NU, PKI dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti Partai Katholik, Parkindo dan PSII. Kemudian di tahun 1971 pada masa orde baru, pemilu kembali dilakukan dengan keikutsertaan 10 partai. Setelah serangkaian pemilu yang dikuasai oleh orde baru yaitu dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar, fase reformasi membawa Indonesia pada pemilu 1999.

Pemilu kemudian kembali dilaksanakan pada tahun 2004. Perkembangannya terletak pada sistem pemilihan Presiden yakni, sistem pemilihan secara langsung. Setelah pemilu dengan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009

pemilu kembali dilaksanakan dengan sistem yang sama namun dengan berbagai perbaikan pada kekurangan pemilu sebelumnya. Terakhir ialah pada tahun 2014 lalu. Pemilu untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah dilaksanakan pada bulan April 2014, sedangkan untuk pemilihan Presiden berlangsung pada bulan Juli 2014 dengan berbagai perbaikan sebagai hasil dari evaluasi terhadap pemilu sebelumnya.

Pemilihan umum dalam bahasa Inggris disebut dengan “*general election*” yaitu, suatu mekanisme memilih pemimpin yang akan menduduki jabatan politik strategis tertentu pada lembaga-lembaga politik formal yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di tingkat pusat dan daerah. Pemilu berfungsi sebagai alat atau mekanisme rakyat pada sebuah negara atau wilayah untuk memilih pemimpin. Fungsi lainnya ialah bahwa pemilu tak dapat lepas dari sistem politik yang ditetapkan pada negara yang bersangkutan. Di negara demokratis, pemilu berfungsi sebagai legitimasi sebenarnya dari rakyat terhadap pemerintahan terpilih hasil pemilu. Sehingga, dukungan rakyat yang rendah menjadi ancaman untuk sistem demokrasi. (Ikhsan, 2015: 144-145). Oleh karena itu, dalam rangka memenangkan suara rakyat atau memperoleh dukungan penuh, setiap kandidat melakukan kampanye.

Sebuah kampanye yang ideal menjadi proses penyampaian pesan-pesan politik dengan tujuan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Melalui kampanye ini, partai-partai politik pengusung berusaha meyakinkan massa pemilih dengan cara mengangkat berbagai agenda yang dianggap akan bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam berkampanye setiap partai politik berusaha menemukan cara yang paling efektif untuk kesuksesan kampanye (Muhtadi, 2008: 145). Dan untuk mencapai kesuksesan tersebut, komunikasi tentu memegang peranan paling penting. Berhasilnya proses komunikasi yang dilakukan dalam penyampaian agenda-agenda kepada masyarakat menandakan tercapainya tujuan kampanye.

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin merupakan calon wakil Presiden pasangan Joko Widodo pada pilpres 2019. Hal ini berdasarkan ketetapan dalam surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1131/ PL. 02.2-Kpt/ 06/ KPU/ IX/ 2018 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden 2019.

Kemunculan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sebagai salah satu cawapres untuk pilpres 2019 menambah keragaman karakter calon wakil Presiden RI di kancah perpolitikan. Pasalnya terhitung sejak tahun 2004 ketika pilpres dilaksanakan dengan sistem pemilihan langsung, beliau merupakan salah satu kiai yang menjadi calon wakil Presiden setelah KH. Hasyim Muzadi. Saat terpilih sebagai calon wakil Presiden pendamping Joko Widodo, Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin sedang menjabat sebagai ketua MUI periode 2015-2020. Disatu sisi, beliau juga menjabat sebagai Rais Aam Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) periode 2015-2020.

KH. Ma'ruf Amin adalah seorang ulama yang berasal dari santri Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Beliau melanjutkan kuliah di Universitas Ibnu Khaldun, Bogor dan memperoleh gelar Doctor HC dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2012 bidang Hukum Ekonomi Syariah. Beliau adalah cicit dari ulama besar Syekh Nawawi Al-Bantani yang merupakan ulama asli Indonesia. Beliau disegani di dunia internasional karena keilmuannya, terutama di Makkah. Syekh Nawawi adalah salah satu Imam Masjidil Haram yang dijuluki Imam Nawawi Atstani.

Selain sebagai ulama, KH. Ma'ruf Amin aktif sebagai politisi. Beliau tercatat menjadi anggota MPR/ DPR dari Fraksa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 1999-2004 dan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) periode 2007-2010 dan periode 2010-2014. Dalam kegiatan ekonomi, KH. Ma'ruf Amin aktif

dalam bidang ekonomi, terutama perbankan syariah. Beliau tercatat sebagai Dewan Pengawas syariah diberbagai bank dan asuransi seperti Bank Muamalat, Bank BNI Syariah dan Bank Mega Syariah (Shohibul, 2018: 11).

KH. Ma'ruf Amin bergabung dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada pertengahan 1990-an dan menjabat sebagai Komisi Fatwa. Kemudian pada tahun 2006, beliau ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa bersama Satria Effendy M. Zen dan Prof. Asmuni Abdurrahman. Satu setengah tahun kemudian, KH. Ma'ruf Amin diangkat sebagai Badan Pelaksana Harian (BPH) Dewan Syariah Nasional. Pada Kamis, 27 Agustus 2015 KH. Ma'ruf Amin terpilih sebagai Ketua Umum sekaligus Pemimpin MUI periode 2015-2020 (Shohibul, 2018: 77-82).

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi tercapainya satu atau beberapa tujuan (Kartini, 2016: 38). Keberhasilan kepemimpinan bergantung pada kemampuan pemimpin dalam menjabarkan kebijakan organisasi-organisasi dan ide-ide ke dalam pengertian praktis yang dapat dengan mudah dipahami serta dapat dilaksanakan oleh para pengikut atau bawahannya. Dengan komunikasi yang efektif dan terbuka akan mendukung dalam terlaksananya tugas-tugas seorang pemimpin (Kartini, 2016: 138). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keberhasilan seorang pemimpin sebagian besar tergantung pada kemampuan atau kecakapan dalam berkomunikasi.

Deddy Mulyana (2008; 14-15) menjelaskan bahwa dalam prakteknya, komunikasi merupakan representasi suatu budaya. Komunikasi dan budaya adalah dua entitas yang tak terpisahkan. Ketika kita berkomunikasi, kita pun berbicara tentang budaya. Budaya menurut Trenholm dan Jensen ialah seperangkat nilai, kepercayaan, norma, adat istiadat, aturan dan kode yang secara sosial

menggambarkan kelompok-kelompok orang, bersifat mengikat satu sama lain serta memberi kesadaran bersama. Budaya memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan kita. Apa yang kita bicarakan, bagaimana membicarakannya, apa yang kita lihat dan kita dengar serta apa yang kita pikirkan dipengaruhi oleh budaya.

Dalam kajian antropologi sosial budaya dijelaskan bahwa tingkah laku manusia bergantung pada proses pembelajaran. Apa saja yang mereka lakukan merupakan hasil dari proses belajar yang telah dilakukan sepanjang hidupnya. Mereka belajar bertingkah laku dengan mencontoh generasi sebelumnya juga dari lingkungan alam serta lingkungan sosial disekitarnya (Sambas, 2016: 13).

Bertitik tolak pada hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kemampuan untuk menyampaikan suatu gagasan sangat penting baik dalam bidang politik maupun sebagai pemimpin organisasi. Kemampuan tersebut tentu saja tidak terbentuk secara instan, melainkan terbentuk seiring proses belajar yang dilakukan oleh individu yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budayanya.

Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin, salah satu tokoh agama dengan latar belakang pendidikan keagamaan serta pengalaman organisasi yang kemudian terpilih menjadi cawapres pada pilpres 2019. Pengalamannya yang berbeda dengan tokoh lainnya membentuk dan mempengaruhi cara beliau dalam menyampaikan sebuah gagasan. Dalam hal ini disebut sebagai gaya komunikasi.

Meskipun perihal keterlibatan kiai dalam perpolitikan Indonesia bukan lagi sesuatu yang baru, namun penulis tertarik untuk mengamati Prof. Dr. KH.Ma'ruf Amin mengingat beliau saat ini selain sebagai tokoh agama juga sebagai cawapres pilpres 2019 yang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh dengan calon lainnya. Selain itu, penelitian terkait Prof. Dr. KH.Ma'ruf Amin menurut amat penulis belum

banyak dilakukan. Oleh karena itu, penting dilakukannya sebuah penelitian untuk menguji pandangan tersebut.

Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, maka penelitian akan dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis semiotik model Roland Barthes. Analisis dilakukan terhadap komunikasi verbal dan non verbal untuk memperoleh pemaknaan mengenai gaya komunikasi Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam aktivitas beliau sebagai tokoh agama serta sebagai cawapres pilpres 2019. Dengan dilakukannya penelitian ini, maka dapat diperoleh hasil ilmiah berupa deskripsi yang sistematis terkait gaya komunikasi beliau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah:

1.2.1 Bagaimana pemaknaan gaya komunikasi publik Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam aktivitasnya sebagai tokoh agama?

1.2.2 Bagaimana pemaknaan gaya komunikasi publik Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam aktivitasnya sebagai cawapres pilpres 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Mendeskripsikan pemaknaan gaya komunikasi publik Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam aktivitasnya sebagai tokoh agama.

1.3.2 Mendeskripsikan pemaknaan gaya komunikasi publik Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin dalam aktivitasnya sebagai cawapres pilpres 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi tambahan dalam penelitian sejenis berikutnya serta sebagai bahan ajar dalam memahami makna dan tanda-tanda dalam komunikasi.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu komunikasi tentang *human communication* serta ilmu komunikasi dalam kaitannya dengan semiotika.

1.5 Batasan Penelitian

Merujuk kepada latar belakang serta rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis, untuk menghindari luas dan melebarnya pembahasan, maka peneliti fokus membahas tanda-tanda verbal dan non verbal yang ada pada video pidato Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin.

Terlepas dari bagaimana proses kampanye Pilpres 2019, apa saja isu politik yang diusung oleh para kandidat, motif dan kepentingan pihak-pihak lain dalam kampanye serta keterlibatan jurnalis dan berbagai media, penelitian ini hanya akan berfokus untuk mendeskripsikan semiotika gaya komunikasi Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin pra dan pasca terpilih sebagai cawapres pilpres 2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian.

- Bab II : Bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan penelitian pada penulisan skripsi sebagai acuan dalam menganalisis fenomena sosial yang diangkat sebagai tema penelitian. Selain itu, pada bab ini terdapat pula pemaparan tentang berbagai penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan konsep maupun tema penelitian yang menjadi panduan dalam menyusun sistem dan konsep penelitian.
- Bab III : Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan untuk penyusunan dan penulisan skripsi ini.
- Bab IV : Bab yang berisi hasil penelitian dan pembahasan penelitian.
- Bab V : Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisi kesimpulan dan saran.